BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Teori Agensi

Seorang pemilik perusahaan tidak dapat menjalankan dan mengawasi seluruh kegiatan operasional perusahaannya. Oleh sebab itu pemilik mempekerjakan seorang manajer yang berperan untuk menjalankan semua kegiatan operasi perusahaan sesuai dengan kebijakan yang sudah ditetapkan dalam perusahaan tersebut. Jensen dan Meckling (1976) menyatakan bahwa hubungan keagenan (*agency relationship*) timbul karena adanya sebuah kontrak antara satu orang atau lebih (*principal*) yang mempekerjakan orang lain (*agent*) untuk memberikan suatu jasa dan kemudian mendelegasikan wewenang pengambilan keputusan kepada *agent* tersebut. Ada dua macam hubungan dalam kerangka teori keagenan, yaitu hubungan antara manajer dengan pemilik dan hubungan antara manajer dengan kreditor.Secara khusus teori keagenan (*agency theory*) membahas tentang adanya hubungan keagenan, dimana suatu pihak tertentu (*principal*) mendelegasikan pekerjaan kepada pihak lain (*agent*) yang melakukan pekerjaan.

Principal sebagai penyedia dana untuk menjalankan perusahaan, mendelegasikan kebijakan keputusan kepada *agent*. *Principal* mempekerjakan *agent* dalam

perusahaan untuk melakukan tugas memaksimalkan laba perusahaan dan meningkatkan kemakmuran pemegang saham, sedangkan manajer perusahaan mempunyai kecenderungan untuk memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya dengan biaya pihak lain dan cenderung tidak menyukai resiko. Manajer tidak menanggung resiko atas kesalahan dalam pengambilan keputusan, resiko tersebut sepenuhnya ditanggung oleh pemegang saham (*principal*). Oleh karena itu, manajemen cenderung melakukan pengeluaran untuk kepentingan pribadinya, seperti peningkatan gaji dan status. *Forum for Corporate Governance in Indonesia* (2000) menyebutkan pemilik perusahaan atau pemegang saham hanya bertugas mengawasi dan memonitor jalannya perusahaan yang dikelola oleh manajemen. Konflik antara manajer dan pemegang saham sering mengatur manajemen puncak perusahaan untuk mengambil keputusan yang tidak dalam kepentingan terbaik pemegang saham, khususnya bila seorang yang oportunis terlibat dalam proses (Jensen and Meckling, 1976).

Agency theory memisahkan fungsi pengelolaan dan fungsi kepemilikan dalam perusahaan, dan sebagai konsekuensi dari pemisahaan ini terjadi berbagai macam konflik agensi (*agency problems*). Berbagai faktor penyebab terjadinya *agency problems*, yaitu ketidakseimbangan informasi (*information asymmetrical*) dan perbedaan kepentingan (*conflict of interest*). Konflik yang terjadi dalam hubungan keagenan merupakan akibat dari ketidakseimbangan informasi (*information asymmetrical*) karena *agent* berada pada posisi yang memiliki informasi yang lebih banyak tentang perusahaan dibandingkan dengan *principal*. Asimetri informasi dan konflik kepentingan ini mendorong *agent* untuk menyajikan informasi yang tidak sebenarnya kepada *principal*.

Arrow (1985) dalam Linda (2005) menjelaskan bahwa ada dua macam *agency problems* yaitu:

1. *Moral hazard*, adalah suatu keadaan saat pemegang saham sebagai *principal* tidak dapat melakukan pengamatan secara detail apakah manajemen sebagai *agent* sudah membuat keputusan secara tepat.
2. *Adverse selection*, adalah suatu keadaan saat seorang *agent* membuat pengamatan yang belum dilakukan oleh *principal* dimana hasil pengamatan tersebut dipakai untuk mengambil keputusan. *Principal* dalam hal ini tidak bisa mengecek apakah informasi hasil pengamatan *agent* telah dipakai dengan baik untuk membuat keputusan yang baik sesuai kepentingan *principal*.

Konflik kepentingan semakin tinggi karena *principal* tidak dapat mengawasi aktivitas *agent* (Watts and Zimmerman, 1986). Tanpa independen dan prosedur pengawasan yang efektif, manajemen puncak perusahaan selalu tergoda untuk menyimpang dari melindungi kepentingan pemegang saham (Fama dan Jensen, 1983). Hal ini dapat mengakibatkan penurunan kepercayaan investasi oleh para investor yang diikuti penurunan nilai perusahaan, oleh karena itu komite audit sebagai salah satu implementasi *Good Corporate Governance* diharapkan mampu meningkatkan kepercayaan investasi dan meningkatkan nilai perusahaan.

2.1.2 Manajemen Laba

2.1.2.1 Pengertian Manajemen Laba

Manajemen laba atau yang sering disebut juga dengan *earnings management* adalah tindakan yang dilakukan oleh manajemen untuk menurunkan atau

menaikan laba dengan tujuan menguntungkan diri sendiri tanpa menghiraukan kepentingan pemegang saham atau *shareholder*.

Scott (dalam Kusumawardhani dan Sylvia, 2009) mendefinisikan *earnings management* sebagai *"the choice by a manager of accounting policies so as to achive spesific objects"* yang dapat diartikan dengan pilihan yang dilakukan oleh manajer dalam menentukan kebijakan akuntansi untuk mencapai beberapa tujuan tertentu. Praktik manajemen laba dipengaruhi oleh adanya *agency problems* yang terjadi dalam hubungan agensi. *Earnings management* merupakan konsekuensi dari pemisahan antara fungsi kepemilikan dan fungsi pengelolaan dalam *agency theory*.

Menurut Sugiri (1998), definisi *earnings management* dapat dibagi dalam dua pengertian, yaitu:

1. Definisi sempit:

   Earnings management dalam hal ini hanya berkaitan dengan pemilihan metode akuntansi. *Earnings management* dalam arti sempit ini didefinisikan sebagai perilaku manajemen untuk "bermain" dengan komponen *discretionary accruals* dalam menentukan besarnya *earnings*.

2. Definisi luas

   Earnings management merupakan tindakan manajer untuk meningkatkan (mengurangi) laba yang dilaporkan saat ini atas suatu unit dimana manajer bertanggung jawab, tanpa mengakibatkan peningkatan (penurunan) profitabilitas ekonomis jangka panjang unit tersebut.

Manajemen laba merupakan suatu intervensi dengan tujuan tertentu dalam proses pelaporan keuangan eksternal, untuk memperoleh beberapa keuntungan privat (sebagai lawan untuk memudahkan operasi yang netral dari proses tersebut). Manajemen laba adalah suatu proses yang dilakukan dengan sengaja dalam batasan *General Addopted Accounting Principles* (GAAP) untuk mengarah pada tingkatan laba yang dilaporkan.

2.1.2.2 Motivasi Manajemen Laba

Banyak motivasi manajer untuk melakukan *earnings management*. Tindakan manajamen untuk memprakarsai kondisi perusahaan dan laba dengan komponen *discretionary accruals*, salah satunya didorong oleh keinginan manajer untuk mendapatkan bonus yang tinggi dari pemilik perusahaan. Manajemen membuat seolah-olah target perusahaan tercapai untuk mendapatkan bonus yang tinggi dari pemilik.

Motivasi-motivasi yang mendorong manejemen untuk melakukan tindakan manipulasi laba dapat dinilai dengan perspektif oportunistis dan perspektif efesiensi. Perspektif oportunistis terjadi apabila tindakan manajemen laba hanya ditujukan untuk mendapat keuntungan bagi manajemen, sedangkan perspektif efesiensi terjadi apabila tindakan manajemen laba ditujukan untuk menggurangi beban perusahaan, seperti beban pajak.

Menurut scott (2003:411), manajemen memiliki beberapa motivasi untuk melakukan manajemen laba, antara lain sebagai berikut:

1. Motivasi bonus

   Manajer yang mempunyai perencanaan bonus akan mengatur laba bersih agar dapat memaksimalkan bonus yang akan didapatnya.

2. Motivasi Kontrak

   Berkaitan dengan kontrak utang jangka panjang, yaitu manajer menaikkan laba bersih untuk mengurangi kemungkinan perusahaan mengalami *technical default*.

3. Motivasi Politik

   Aspek politik ini tidak dapat dilepaskan dari perusahaan, khususnya perusahaan besar dan industri strategis karena aktivitasnya melibatkan hajat hidup orang banyak.

4. Motivasi Pajak

   Pajak merupakan salah satu alasan utama perusahaan mengurangi laba bersih yang dilaporkan.

5. Pergantian CEO *(Chief Executive Officer)*

   Banyak motivasi yang timbul berkaitan dengan CEO, seperti CEO yang mendekati masa pensiun akan meningkatkan bonusnya, CEO yang kurang berhasil memperbaiki kinerjanya untuk menghindari pemecatannya, CEO baru untuk menunjukan kesalahan dari CEO sebelumnya.

6. Penawaran saham Perdana (IPO)

   Manajer perusahaan yang *go public* melakukan *earnings management* untuk memperoleh harga saham yang lebih tinggi atas sahamnya dengan harapan mendapatkan respon pasar yang positif terhadap peramalan laba sebagai sinyal dari nilai perusahaan.

7. Motivasi Pasar Modal

   Misalnya sinyal untuk mengungkapan informasi privat yang dimiliki perusahaan kepada investor dan kreditor.

Berdasarkan uraian tentang motivasi yang dimiliki oleh manajer untuk melakukan *earnings management*, menimbulkan kesulitan untuk menentukan sifat dari *earnings management* apakah bersifat oportunistik atau efesiensi. Motivasi pasar modal, motivasi pajak, dan motivasi bonus merupakan tiga motivasi dengan kepentingan yang berbeda.

2.1.2.3 Pola Manajemen Laba

Menurut Scott (2003:405) berbagai pola yang sering dilakukan manajer dalam *earnings management* adalah:

1. *Taking a bath*

   Terjadi apabila perusahaan melaporkan laba yang tinggi, manajer dipaksa untuk melaporkan laba yang tinggi, konsekuensinya manajer akan menghapus aktivadengan harapan laba yang akan datang dapat meningkat. Bentuk ini mengakui adanya biaya pada periode yang akan datang sebagai kerugian pada periode berjalan, ketika kondisi buruk yang tidak menguntungkan tidak dapat dihindari pada periode tersebut. Untuk itu, manajemen harus menghapus aktiva dan membebankan perkiraan biaya yang akan datang pada saat ini serta melakukan *clear the desk*, sehingga laba yang dilaporkan di periode yang akan datang meningkat.

2. *Income minimization*

   Bentuk ini dilakukan sebagai alasan politis pada periode laba yang tinggi dengan mempercepat penghapusan aktiva tetap dan aktiva tidak berwujud dan mengakui pengeluaran-pengeluaran sebagai biaya. *Income minimization* biasanya diterapkan pada *tax management.*

3. *Income maximization*

   Tindakan ini bertujuan untuk melaporkan *net income* yang tinggi untuk tujuan bonus yang lebih besar. Perencanaan bonus yang dibuat oleh manajemen didasarkan pada data akuntansi dan memotivasi manajer untuk memanipulasi data akuntansi guna menaikan atau menurunkan laba yang nantinya dapat meningkatkan pembayaran bonus tahunan. Tindakan ini dilakukan pada saat laba perusahaan menurun.

4. *Income smoothing*

   Hal ini dilakukan dengan meratakan laba yang dilaporkan untuk tujuan pelaporan eksternal, terutama bagi investor karena pada umumnya investor menyukai laba yang relatif stabil.

2.1.2.4 *Discretionary Accrual*

Perubahan metode pencatatan dari kas basis ke akrual basis, memberikan kesempatan kepada manajer untuk mempengaruhi tingkat laba. Sistem akuntansi akrual sebagaimana yang ada pada prinsip akuntansi, dapat memberikan keleluasaan kepada manajemen mempengaruhi tingkat pendapatan perusahaan. Manajemen dapat mempengaruhi laba dengan komponen *discretionary acrruals*.

Menurut Healy (1985) dan DeAngelo (1986) yang dikutip oleh Gumanti (2000), konsep model akrual memiliki dua komponen yaitukomponen *non-discretionary* dan *discretionary*. Komponen *discretionary accrual* merupakan bagian akrual yang dapat dimanipulasi oleh manajemen. Hal ini disebabkan karena manajer memiliki kemampuan untuk mengontrolnya dalam jangka pendek.

2.1.3 Komite Audit

2.1.3.1 Pengertian Komite Audit

Indonesia telah menerapkan *Good Corporate Governance*sebagai prinsip tata kelola perusahaan. *Corporate governan*ce merupakan suatu proses dan struktur yang digunakan oleh suatu perusahaan untuk meningkatkan sistem pengawasan terhadap kinerja manajemen dengan lebih memperhatikan kepentingan investor. *Good Corporate Governance* merupakan sistem yang mengatur dan mengendalikan perusahaan untuk menciptakan nilai tambah *(value added)* untuk semua *stakeholder* (Sulistyanto dan Wibisono, 2003).

Komite Audit merupakan salah satu unsur kelembagaan dalam konsep *Good Corporate Governance*. Arrens dan Loebbecke (2000) menyatakan bahwa "*An audit commite is a selected number of members of company's board of directors whose responsibilities include helping auditors remain independent of management. Most audit commitees are made up three to five or sometimes as many as seven directors who are not a part of company management*", yang kurang lebih memiliki arti sebagai berikut: Sebuah komite audit merupakan salah satu organisasi dewan perusahaan yang memiliki tanggung

jawab dalam tindakan audit pada aktivitas manajemen. Biasanya komite audit terdiri dari tiga sampai lima orang atau terkadang terdiri dari tujuh orang dewan yang tidak tergabung dalam bagian manajemen perusahaan.

Komite Nasional Kebijakan Governance (2006) dalam Pedoman Umum*Good Corporate Governance* Indonesia menyatakan bahwa komite audit adalah sekelompok orang yang dipilih oleh kelompok yang lebih besar untuk mengerjakan pekerjaan tertentu atau untuk melakukan tugas-tugas khusus atau sejumlah anggota dewan komisaris perusahaan klien yang bertanggung jawab membantu auditor dalam mempertahankan independensinya dari manajemen.

Komite audit dibentuk oleh dewan komisaris dan bertanggungjawab kepada deewan komisaris dengan tugas dan tanggung jawab utama untuk memastikan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* terutama *transparency* dan *disclousure* diterapkan secara konsisten dan memadai oleh para eksekutif (Tjager dkk, 2003). Keberadaan komite audit diharapkan mampu memberikan kontribusi yang tinggi dalam menerapkan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance(independency, transparency, accountability and responsibility, and fairness).*

2.1.3.2 Struktur dan Keanggotaan Komite Audit

Berdasarkan Surat Edaran Direksi PT. Bursa Efek Jakarta No.SE-339/BEJ/ 07 -2001 tanggal 21 Juli 2001 menyatakan bahwa:

1. Komite audit terdiri dari sekurang-kurangnya 3 orang
2. Seorang komisaris independen menjadi ketua

3. Anggota lainnya merupakan pihak eksternal yang independen
4. Sekurang-kurangnya satu orang memiliki kemampuan di bidang akuntansi dan/atau keuangan.

Untuk menjadi anggota komite audit, ada beberapa persyaratan sebagai bahan pertimbangan kualifikasi keanggotaan komite audit. Persyaratan ini juga ditujukan supaya komite audit memiliki kompetensi yang tinggi dalam fungsi pengendalian perusahaan. Adapun persyaratan untuk menjadi anggota komite audit, yaitu:

1. Memiliki integritas yang baik dan pengetahuan serta pengalaman kerja yang cukup di bidang pengawasan atau pemeriksaan dan bidang-bidang lainnya yang dianggap perlu.
2. Tidak memiliki kepentingan atau keterikatan pribadi yang dapat menimbulkan dampak negatif dan konflik kepentingan.
3. Tidak mempunyai saham baik langsung maupun tidak langsung pada emiten atau perusahaan publik.
4. Mampu berkomunikasi secara efektif.

2.1.3.3 Peran dan Tanggung Jawab Komite Audit

Ikatan Komite Audit Indonesia (2010) menyatakan bahwa keberadaan komite audit diharapkan mampu meningkatkan kualitas pengawasan internal perusahaan, serta mengoptimalkan mekanisme *check and balances*, yang pada akhirnya ditujukan untuk memberi perlindungan kepada para pemegang saham dan *stakeholder* lainnya. Tugas komite audit meliputi menelaah kebijakan akuntansi yang diterapkan oleh perusahaan, menilai pengendalian

internal, menelaah sistem pelaporan eksternal dan kepatuhan terhadap peraturan (Suaryana, 2004).

Berdasarkan keputusan Ketua BAPEPAM Nomor: Kep-41/PM/2003 tanggal 22 Desember 2003 yang menyatakan bahwa komite audit bertugas untuk memberikan pendapat kepada dewan komisaris terhadap laporan keuangan atau hal-hal yang disampaikan oleh direksi kepada dewan komisaris, mengidentifikasi hal-hal yang memerlukan perhatian dewan komisaris, dan melaksanakan tugas-tugas lain yang berkaitan dengan tugas dewan komisaris.

Forum for Corporate Governance in Indonesia (FCGI) dalam *booklet* terbitannya yang berjudul " Peranan Dewan Komisaris dan Komite Audit dalam Pelaksanaan *Good Corporate Governance*", menyatakan bahwa komite audit mepunyai tanggung jawab dalam tiga bidang sebagai berikut:

1. Laporan Keuangan (*financial Reporting*)

   Untuk memastikan bahwa laporan keuangan yang dibuat oleh manajemen telah memberikan gambaran yang sebenarnya tentang kondisi perusahaan.

2. Tata Kelola Perusahaan (*Corporate Governance*)

   Untuk memastikan bahwa perusahaan telah dijalankan sesuai dengan undang-undang dan peraturan yang berlaku, melaksanakan usahanya dengan beretika, melaksanakan pengawasan secara efektif terhadap benturan kepentingan dan kecurangan yang dilakukan oleh karyawan perusahaan.

3. Pengawasan Perusahaan (*Corporate Control*)

   Komite audit bertanggung jawab untuk pengawasan perusahaan termasuk di dalamnya pemahaman tentang masalah serta hal-hal yang mengandung

risiko dan sistem pengendalian internal serta memonitor proses pengawasan yang dilakukan oleh auditor internal.

2.1.3.4 Tujuan dan Manfaat Pembentukan Komite Audit

Pembentukan komite audit juga bermanfaat untuk menjembatani berbagai komunikasi antara pihak-pihak yang berkepentingan mengenai pengungkapan informasi perusahaan. Sesuai dengan peran dan tanggung jawab komite audit sebagai fungsi pengendalian dan pengawasan dalam perusahaan, keberadaan komite audit juga diharapkan mampu membuat komikasi yang efektif dalam menjalankan fungsi pengendalian.

Menurut Effendi (2002), komunikasi yang dilakukan oleh komite audit antara lain:

1. Komunikasi komite audit dengan dewan komisaris

   Komite audit melaporkan hasil tugas yang dibebankan oleh komisaris dalam bentuk laporan secara berkala ketika rapat internal diselenggarakan.
2. Komunikasi komite audit dengan manajemen

   Manajemen memberikan laporan atas beberapa aktivitas manajemen yang krusial kepada komite audit sebagai bentuk pertanggungjawaban pihak manajemen pada saat rapat komite.
3. Komunikasi komite audit dengan internal auditor

   Auditor internal memberikan informasi kepada komite audit sesuai dengan *Statement on Auditing Standard* (SAS) No. 61.

4. Komunikasi internal audit dengan eksternal auditor

   Komunikasi yang terjadi dapat berbentuk lisan atau tertulis dimana berbagai informasi dapat dikomunikasikan diantara keduanya.Kedudukan komite audit dengan kompetensi yang tinggi diharapkan dapat mengoptimalkan fungsi auditor eksternal bagi perusahaan.

Dengan adanya komite audit, diharapkan mampu menekan asimetri informasi yang ada dalam perusahaan sehingga mengurangi kemungkinan terjadinya penyimpangan yang dilakukan oleh manajemen. Komunikasi yang baik dan efektif dalam suatu perusahaan akan memudahkan proses pengawasan yang dilakukan oleh komite audit.

2.1.3.5 Karakteristik Komite audit

a. Independensi Komite Audit

Dalam melakukan pengawasan terhadap kinerja manajemen *(agent)*, komite audit harus berupaya mengurangi penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan oleh manajer sehingga mengurangi kerugian dari pemilik perusahaan *(principal)*. Independensi merupakan karakter yang tidak terikat dengan pihak manupun dan tidak mudah dipengaruhi keputusannya oleh pihak manapun, sehingga karakter ini memastikan pelaporan keuangan yang lebih berkualitas. *New York Stock Exchange* (2002) mensyaratkan perusahaan untuk mengungkapkan bahwa *independent directors* tidak mempunyai hubungan material dengan perusahaan yang bersangkutan.

Salah satu alasan utama independensi ini adalah untuk memelihara integritas serta pandangan yang objektif dalam laporan serta penyusunan rekomendasi

yang diajukan oleh komite audit, karena individu yang independen cenderung lebih adil dan tidak memihak secara objektif dalam menangani suati permasalahan (FCGI, 2000).

b. *Financial Expertise* Komite Audit

Anggota komite audit disyaratkan independen dan sekurang-kurangnya ada satu orang yang memiliki kemampuan di bidang akuntansi. Anggota komite yang mempunyai keahlian di bidang keuangan juga dapat meningkatkan fungsi pengawasan pemilik perusahaan *(principal)* terhadap pihak manajemen *(agent).* Dengan semakin besar proporsi anggota yang mempunyai keahlian di bidang keuangan maka pelaporan keuangan oleh manajemen akan lebih berkualitas. Anggota komite audit yang mempunyai keahlian di bidang keuangan akan lebih mudah mendeteksi manipulasi laba yang dapat menguntungkan manajemen saja. NYSE yakin keberadaan ahli akuntansi atau keuangan akan lebih memberdayakan komite audit untuk melakukan penilaian secara independen atas informasi yang diterimanya.

c. Ukuran Komite audit

Ukuran komite audit berarti jumlah anggota dari komite audit yang ada dalam suatu perusahaan. Ukuran komite audit mendukung fungsi pengawasan terhadap manajemen *(agent).* Semakin besarnya ukuran komite audit, akan meningkatkan fungsi *monitoring* pada komite audit terhadap kinerja manajemen. Peningkatan dalam fungsi monitoring akan meningkatkan kualitas pelaporan keuangan dan menekan *earnings management* dalam perusahaan.

2.1.4 Nilai Perusahaan

Nilai perusahaan didefinisikan sebagai nilai pasar atas saham. Menurut Keown(2006:249), nilai pasar adalah nilai yang berlaku di pasaran. Nilai perusahaan menjadi persepsi untuk investor dalam melakukan investasinya. Nilai perusahaan dalam literatur akuntansi, dapat dilihat dari perbandingan antara harga saham dengan nilai buku saham *(price to book value)* dan rasio harga saham dengan nilai buku per saham *(market book ratio).*

Dalam melakukan penilaian terhadap suatu perusahaan, dipengaruhi oleh unsur proyeksi, asuransi, dan *judgement.* Ada beberapa rasio yang dapat digunakan untuk mengukur nilai perusahaan, salah satu alternatif yang dapat digunakan adalah dengan menggunakan *Tobin's Q*. Rasio ini dikembangkan oleh Tobin dan dinilai dapat memberikan informasi yang paling baik karena rasio ini menjelaskan berbagai fenomena dari kegiatan perusahaan seperti terjadinya *crossectional* dalam pengambilan keputusan investasi dan diverifikasi, hubungan antar kepemilikan saham manajemen dan nilai perusahaan, hubungan antara kinerja manajemen dengan keuntungan dalam akuisisi dan kebijakan perusahaan, deviden dan kompensasi (Sukamulja, 2004).

Menurut Tobin (dalam Sukamulja, 2004), *Tobin's Q* memiliki karakteristik antara lain:

1. *Replacement Cost vs Book Value*

   Tobin's Q menggunakan *replacement cost* sebagai denominator sedangkan *market book ratio* menggunakan *book value of total equity*. Penggunaan *replacement cost* membuat nilai yang digunakan untuk

menentukan*Tobin's Q* memasukan berbagai faktor, sehingga nilai yang digunakan mencerminkan nilai pasar dari aset yang sebenarnya dimasa kini, salah satu faktor tersebut adalah inflasi.

2. *Total Asset vs Total Equity*

   Market book Value hanya menggunakan faktor ekuitas (saham biasa dan saham preferen) dalam pengukuran. *Tobin's Q* memberikan wawasan luas terhadap investor. Perusahaan sebagai entitas ekonomi, tidak hanya menggunakan ekuitas dalam mendanai kegiatan operasionalnya, namun juga dari sumber lain seperti hutang, baik jangka pendek maupun jangka panjang. Oleh karena itu, penilaian perusahaan tidak hanya dari investor ekuitas saja, tetapi juga dari kreditor. Semakin besar pinjaman yang diberikan oleh kreditur, menunjukan bahwa semakin tinggi pula kepercayaan yang diberikan oleh kreditur. Hal ini juga menunjukan bahwa perusahaan memiliki nilai pasar yang lebih besar lagi. Dengan dasar tersebut, *Tobin's Q* menggunakan *market value of total asset.*

2.2 Penelitian Terdahulu

Penelitian Wedari (2004) yang berjudul "Analisis Pengaruh Dewan Komisaris Dan Keberadaan Komite Audit Terhadap Aktivitas Manajemen Laba". Manajemen laba diukur dengan menggunakan *discretionary accrual* dengan model Jones. Sampel dipilih dari populasi perusahaan yang sahamnya terdaftar dan diperdagangkan di BEJ, berdasarkan kriteria tertentu.

Suaryana (2004) menguji pengaruh keberadaan komite audit terhadap kualitas laba. Kualitas laba diukur dengan metode pengukuran koefisien respon laba yang

terdiri dari komponen capital *adequency ratio* dan *unexpected return*. Hasil penelitian menunjukan koefesien respon laba pada perusahaan yang membentuk komite audit lebih besar daripada perusahaan yang tidak membentuk komite audit.

Penelitian juga dilakukan oleh Lin et al. (2006) bertujuan untuk mengetahui efek dari kinerja komite audit terhadap kualitas laba. Kualitas laba diukur dari apakah perusahaan melakukan *restatement* atau tidak, karena adanya *restatement* menunjukan praktik manajemen laba yang dilakukan oleh pihak internal perusahaan. Dari seluruh karakteristik komite audit yang diuji: independensi, ukuran, jumlah, jumlah pertemuan, *financial expertise*, dan *stock ownership*, hanya ukuran komite audit yang berpengaruh terhadap kualitas laba. Penelitian ini menunjukan bahwa semakin besar komite audit akan mengurangi terjadinya *restatement* oleh perusahaan.

Siallagan *et al*. (2006) menguji pengaruh mekanisme *corporate governance* yang dilakukan perusahaan terhadap manajemen laba. Kualitas laba diukur dengan *discretionary accrual*. Hasil penelitian menunjukan hubungan yang positif antara keberadaan dan besarnya ukuran dewan direksi maupun komite audit dengan kualitas laba.

Herawati (2008) membuktikan bahwa variabel *corporate governance* mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap nilai perusahaan dengan variabel komisaris independen dan kepemilikan institusional. Kepemilikan manajerial akan menurunkan nilai perusahaan sedangkan klasifikasi akuntan publik akan meningkatkan nilai perusahaan. Penelitian ini mengambil sampel perusahaan non

keuangan dari populasi perusahaan yang *listing* di BEI tahun 2004-2006. Analisis data yang digunakan adalah analisis regresi berganda.

Pertiwi (2010) membuktikan bahwa variabel*corporate governance* mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap nilai perusahaan melalui kepemilikan institusional.Penelitian ini mengambil sampel perusahaan non keuangan dari populasi perusahaan yang *listing* di BEI tahun 2005-2008. Analisis data yang digunakan adalah analisis regresi berganda.

Tabel 2.1 Ringkasan Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Variabel	Alat Analisis	Hasil Penelitian
1.	Wedari (2004)	Analisis pengaruh Dewan Komisaris Dan Keberadaan Komite Audit Terhadap Aktivitas Manajemen Laba	Variabel Dependen: - aktivitas manajemen laba Variabel Independen: -Dewan komisaris - Keberadaan komite audit	Regresi	Proporsi dewan komisaris dan keberadaan komite audit tidak mampu mengurangi aktivitas manajemen laba
2.	Suaryana (2004)	Pengaruh komite audit terhadap kualitas laba	Variabel Dependen: -Koefesien Respon laba Variabel Independen: -keberadaan komite audit	Regresi	Koefesien respon laba yperusahaan yang membentuk komite audit lebih besar dari pada yang tidak membentuk komite audit

3.	Lin, Li, dan Yang (2006)	*The Effect of Audit committee performance on Earnings Quality*	Variabel Dependen: -*Earnings restatement* Variabel Independen: -*Audit Committe*	Regresi	Hanya ukuran komite audit yang berpengaruh secara negatif terhadap kualitas laba
4.	Siallagan dan Machfoedz (2006)	Mekanisme *Corporate Governance*, Kualitas Laba dan Nilai	Variabel Dependen: - Kualitas laba - Nilai Variabel Independen: - *Corporate governance*	Regresi	Mekanisme corporate governance dan keberadaan komite audit berpengaruh positif terhadap kualitas laba
5.	Herawaty (2008)	Peran Praktek *Corporate Governance* sebagai Moderating Variable dari Pengaruh *Earning Management* Terhadap Nilai Perusahaan	Variabel Dependen: - Nilai perusahaan Variabel Moderating: - *Corporate Governance* Variabel Independen: - *Earnings Management*	Regresi	Kepemilikan manajerial akan menurunkan nilai perusahaan, klasifikasi akuntan akan meningkatkan nilai perusahaan
6.	Pertiwi (2010)	Analisis Pengaruh *Earning Management* terhadap nilai perusahaan dengan peranan praktik *corporate governance* sebagai moderating variabel	Variable Dependen: - Nilai perusahaan Variabel Moderating: - *Corporate governance* Variabel Independen: -*Earning management*	Regresi	Kepemilikan institusional mempunya pengaruh yang signifikan dalamhubungan antara *earning management* dengan nilai perusahaan.

2.3 Kerangka Pemikiran

Pemisahan fungsi kepemilikan dan fungsi pengelolaan dalam perusahaan cenderung memunculkan konflik keagenan diantara *principal* dan *agent*. Konflik keagenan didasari munculnya teori agensi. Konflik keagenan ini dilatarbelakangi perbedaan kepentingan pihak manajemen dengan kepentingan pemilik (pemegang saham) perusahaan.

Banyaknya kasus manipulasi terhadap laba yang sering dilakukan oleh manajemen mendorong perusahaan untuk menerapkan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* yang diharapkan mampu meminimalisir praktik manajemen laba. Salah satu mekanisme yang digunakan dalam penerapan *Good Corporate Governance* adalah dibentuknya komite audit. Keberadaan komite audit diharapkan mampu meningkatkan pengawasan dan *monitoring* pada kinerja manajemen yang dapat mempegaruhi praktik manajemen laba. Komite audit juga diharapkan dapat berfungsi sebagai alat untuk meberi keyakinan kepada investor bahwa mereka akan menerima *return* atas dana yang mereka investasikan.

Kerangka pemikiran mengenai hubungan antar variabel penelitian dapat diilustrasikan pada gambar 2.1 sebagai berikut:

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran Penelitian

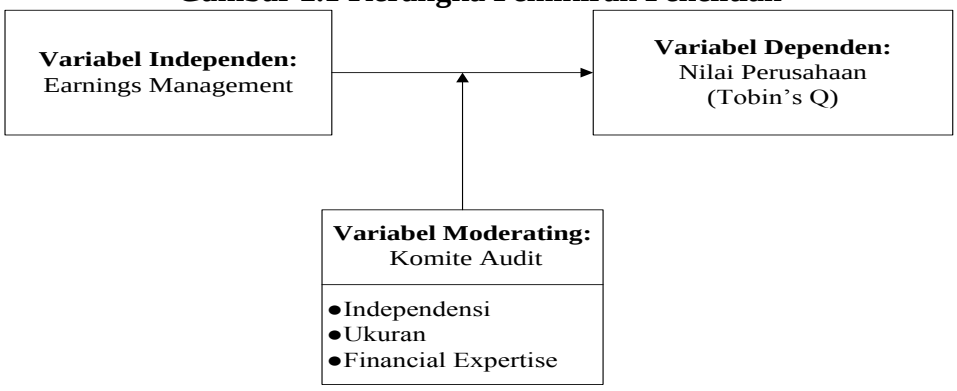

2.4 Hipotesis

2.4.1 *Earnings Management* dan Nilai Perusahaan

Fungsi pengelolaan perusahaan seutuhnya dikendalikan oleh pihak manajemen perusahaan. Manajemen perusahaan mengetahui lebih banyak informasi internal dan prospek perusahaan di masa yang akan datang dibanding pemilik (pemegang saham). Kondisi seperti ini menimbulkan keadaan asimetri informasi *(information asymetric)*. Dengan adanya asimetri informasi, memberikan kesempatan pada manejer untuk melakukan manajemen laba guna meningkatkan nilai perusahaan pada saat tertentu sehingga dapat menyesatkan pemilik (pemegang saham) mengenai nilai perusahaan yang sebenarnya.

Dalam kinerjanya, manajemen memiliki fleksibilitas untuk memilih beberapa alternatif dalam mencatat transaksi sekaligus memilih opsi-opsi yang ada dalam perlakuan akuntansi. Perilaku manajemen yang mendasari lahirnya manajemen laba adalah perilaku *oppurtunistic* dan *efficient contracting*. Perilaku oportunis ini dilakukan dengan merekayasa keuangan dengan menerapkan *income increasing* dan *income decresing decretionary accrual*. Sedangkan *effecient contracting* yaitu meningkatkan keinformatifan laba dalam mengkomunikasikan informasi yang bersifat privat.

Sloan (dalam Herawati, 2008) menguji sifat kandungan informasi dalam komponen akrual dan komponen aliran kas apakah terefleksi dalam harga saham. Terbukti bahwa kinerja laba yang berasal dari komponen akrual sebagai aktifitas *earnings management* memiliki persistensi yang lebih rendah dibanding aliran kas. Dengan demikian dapat disusun hipotesis sebagai berikut:

H1 : Perilaku *earnings management* berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan.

2.4.2 Pengaruh Independensi Komite Audit Terhadap Hubungan Antara *Earnings Management* dan Nilai Perusahaan

Komite audit berperan penting dalam mengawasi pihak manajemen agar tidak melakukan tindakan yang dapat menguntungkan dirinya sendiri sehingga dapat merugikan pihak perusahaan. Salah satu dari karakteristik komite audit yang dapat meningkatkan fungsi pengawasan adalah independensi. Independensi adalah keadaan dimana sesorang bebas dan tidak berpihak kepada kepentingan pihak manajemen ataupun pihak pemilik (pemegang saham). Anggota komite audit yang independen akan memastikan laporan keuangan yang lebih berkualitas.

Hasil beberapa penelitian sebelumnya menunjukkan adanya pengaruh positif atas komposisi anggota komite yang di dominasi oleh pihak-pihak independen terhadap kinerja komite audit. Seperti penelitian McMullen dan Raghunandan (1996) yang membuktikan bahwa direktur non-eksekutif akan mengurangi kemungkinan manipulasi laporan keuangan yang diikuti dengan peningkatan nilai perusahaan.

Berdasarkan uraian dan hasil penelitian terdahulu, maka dapat ditarik suatu hipotesis sebagai berikut:

H2 : Keberadaan independensi komite audit berpengaruh positif dalam hubungan *earnings management* terhadap nilai perusahaan.

2.4.3 Pengaruh *Financial Expertise* Komite Audit Terhadap Hubungan Antara *Earnings Management* dan Nilai Perusahaan

Financial expertise merupakan keahlian seseorang di bidang keuangan. Proporsi anggota komite audit yang ahli di bidang keuangan juga dapat meningkatkan fungsi pengawasan terhadap pihak manajemen. Dengan semakin besar proporsi anggota komite audit yang memiliki *financial expertise* maka pelaporan keuangan akan lebih berkualitas. Komite audit yang memiliki paling tidak satu anggota yang ahli di bidang keuangan, akan memudahkan dalam mendeteksi penyimpangan di laporan keuangan tersebut dan adanya manipulasi laba yang menguntungkan manajemen saja.

Abbot *et al*. (2004) dan DeZoort *et al*. (2001) dalam Lin *et al*. (2006) menyatakan bahwa terdapat hubungan positif antara *financial expertise* dengan adanya manajemen laba. Penelitian-penelitian ini menemukan bukti bahwa komite audit yang memiliki anggota yang ahli di bidang keuangan akan mampu mengawasi terjadinya manajemen laba.

Untuk menguji mengenai pengaruh *financial expertise* terhadap *earnings management* dan nilai perusahaan, maka penelitian ini menguji hipotesis yang dirumuskan sebagai berikut:

H3 : Keberadaan *financial expertise* dalam komite audit akan berpengaruh positif dalam hubungan *earnings management* terhadap nilai perusahaan.

2.4.4 Pengaruh Ukuran Komite Audit Terhadap Hubungan Antara *EarningsManagement* dan Nilai Perusahaan

Karakteristik komite audit lainnya yang dapat mendukung fungsi pengawasan terhadap manajemen adalah ukuran komite audit. Semakin besarnya ukuran komite audit akan meningkatkan fungsi *monitoring* terhadap pihak manajemen, sehingga para pengguna laporan keuangan merasa bahwa kualitas laporan keuangan semakin terjamin.

Yang dan Khrisnan (2005) dalam Lin*et al*. (2006) berhasil membuktikan bahwa terdapat hubungan negatif antara ukuran komite audit dengan manajemen laba *(discretionary accrual)*. Hasil tersebut mengindikasikan bahwa semakin besar ukuran komite audit maka pelaporan keuangan semakin terjamin.

Berdasarkan uraian diatas, maka dapat ditarik suatu hipotesis sebagai berikut:

H4 : Semakin besar ukuran suatu komite audit dalam perusahaan akan berpengaruh positif dalam hubungan *earnings management* terhadap nilai perusahaan.